

**PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KEMAMPUAN
PEGAWAI**

(Suatu Studi Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemampuan Pegawai Dalam
Pembuatan Akta Kelahiran di Bidang Layanan Catatan Sipil Badan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA
010910201079

Dosen Pembimbing :

Dra. Nasikah Hadi
130 676 289

Drs. Anwar , M.Si
131 759 528

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2005

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, A. Rochim dan Mariya atas segala doamu yang tak kenal lelah, nasehat dan petuahmu yang selalu memberi jalan terang dalam hidupku, kasih sayangmu dan perhatianmu yang tak lekang oleh waktu.
2. Kakak-kakakku yang tersayang, Arief Rahman Hakim, Eni Winarsih, Djaka Santoso, Dian Rifyah, Agus Hariyanto, Iis Aswatul Aisyiah atas segala doa, nasehat dan kasih sayang yang telah diberikan.
3. Keponakanku tersayang, Devi Citra Sari, Annisa Ayu Mayang Sari, Yasmin Nabila Rahman, Nadya Alfiana Sari, Ananda Mutiara Sakinah, canda tawamu selalu mewarnai hariku.
4. Evi Wahyuningtyas yang kusayang, atas segala motivasi yang selalu memberiku semangat, doa dan perhatian serta keriangannya yang memberi warna dalam hatiku.

MOTTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke gagalannya berikutnya tanpa kehilangannya semangat.

(Winston Churchill)

“Tak pantas bagi orang bodoh mendiamkan kebodohnya, juga tidak pantas orang yang berilmu mendiamkan ilmunya”.

(HR. Ath Thobrani, Ibnu Sunni dan Abu Nu'ain)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan (Suatu Studi Pengaruh Kemampuan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Administrasi Dasar di Bidang Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember)” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas kepada:

1. Bapak Dr. Ung Nasdia BSW, Ms, selaku Dekan Fisip Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisip
3. Bapak Drs. Agus Suharsono, M Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip.
4. Dra. Nasikah Hadi selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. Anwar , M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang memberi pengarahan, masukan dan nasehat dalam penulisan penelitian ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pengajar di FISIP Universitas Jember.
7. Bapak Drs. H. R. Hendroyono MBA, MM selaku Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember beserta seluruh pegawai Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk bekerja sama dan membantu memberikan informasi-informasi dan data demi penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman AN angkatan 2001.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangan pemikiran baik berupa masuk maupun kritikan dari pembaca agar penulisan skripsi ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca pada khususnya dalam bidang Administrasi Negara.

Jember, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Teori	11
1.4.1 Konsep Pendidikan	18
1.4.2 Konsep Kemampuan Pegawai	22
1.5 Hipotesis	23
1.6 Definisi Operasional	24
1.6.1 Operasional Variabel Pengaruh (X)	25
1.6.2 Operasional Variabel Terpengaruh (Y)	27
1.7 Metode Penelitian	29
1.7.1 Penentuan Populasi	30
1.7.2 Metode Penentuan Sampel	30
1.7.3 Metode Pengumpulan Data	30
1.7.4 Metode Analisis Data	31
BAB 2. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	33
2.1 Pengantar	33
2.2 Sejarah Singkat Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	33
2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan serta Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	34
2.3.1 Kedudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	34
2.3.2 Tugas Pokok Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	34

2.3.3 Fungsi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	35
2.3.4 Kewenangan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	35
2.4 Visi dan Misi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	36
2.4.1 Visi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	36
2.4.2 Misi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	36
2.5 Keadaan Pegawai Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	37
2.6 Struktur Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	39
2.7 Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember	48
BAB 3. PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN	50
3.1 Pengantar	50
3.2 Variabel Pendidikan	50
1. Pendidikan Formal	50
2. Pendidikan Non Formal	51
3.3 Variabel Kemampuan Pegawai	54
1. Keterampilan	54
2. Pengetahuan	56
BAB 4. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	59
4.1 Pengantar	59
4.2 Analisis Chi Square	59
1. Memasukkan Frekuensi Observasi Ke Dalam Tabel Persiapan	61
2. Menentukan Jumlah Marginal	62
3. Menentukan Alpha	62
4. Memasukkan Data Dalam Rumus	62
5. Penentuan Diterima atau Ditolaknya Hipotesis	62
BAB 5. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 Data Jumlah Penduduk Kab. Jember Selama Bulan April, Mei dan Juli-Oktober Tahun 2004	4
1.2 Data Jenis Pelayanan Catatan Sipil Bulan Januari-Oktober Tahun 2004	5
2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Bidang Pekerjaan	37
2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	38
2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
2.4 Data Responden	49
3.1 Data Berdasarkan Skor Jawaban Responden Terhadap Indikator Pendidikan Formal	51
3.2 Data Berdasarkan Skor Jawaban Responden Terhadap Indikator Pendidikan Non Formal	52
3.3 Data Berdasarkan Skor Jawaban Terhadap Variabel Pendidikan.....	53
3.4 Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Pendidikan Pegawai.....	53
3.5 Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Pendidikan.....	54
3.6 Data Berdasarkan Skor Jawaban Responden Terhadap Indikator Keterampilan	55
3.7 Data Berdasarkan Skor Jawaban Responden terhadap Indikator Pengetahuan.....	56
3.8 Data Berdasarkan Skor Jawaban Responden Terhadap Indikator Kemampuan.....	57
3.9 Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Kemampuan Pegawai	58

TABEL	HALAMAN
3.10 Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Kemampuan Pegawai	58
4.1 Data Kategori Responden Tentang Pengaruh Pendidikan terhadap Kemampuan Pegawai	61
4.2 Tabel Persiapan Untuk Mengetahui Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemampuan Pegawai	61

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- | | |
|-----|---|
| I | Kuiseoner |
| II | Surat Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember |
| III | Surat Penelitian dari Bakesbang Kabupaten Jember |
| IV | Surat Telah Melakukan Penelitian dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan Otonomi Daerah banyak memberikan perubahan dalam wajah pemerintahan di Indonesia. Hal ini karena Otonomi Daerah telah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus, dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 1 butir h UU No. 22/1999, pengertian Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Widjaja (26:1998) memberi pengertian otonomi bagi suatu daerah harus mampu:

1. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana, pelaksanaannya).
2. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang kualified.
3. Membuat peraturan sendiri.
4. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak retribusi dan lain-lain usaha yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Dari uraian di atas jelas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan Otonomi Daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disamping menimbulkan semangat dalam sampul negara kesatuan RI.

Sejauh ini aspirasi masyarakat menunjukkan peningkatan layanan umum sebagai poin utama tuntutan nya atas penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Daerah. Karenanya kinerja pelayanan umum bisa ditetapkan sebagai salah satu tolak ukur penting menilai keberhasilan otonomi. (Jawa Post, 14 Oktober 2004). Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Rasyid (2000:13) bahwa "Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai kemajuan bersama".

Pentingnya pelayanan umum ini juga disampaikan oleh PERSADI (dalam Djihabuddin dan Harahap, 1998:55). Mereka berpendapat bahwa :

Tingkat efisiensi suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut dalam menjaga tingkat keseimbangan yang ingin dicapai. Untuk mencapai struktur bangsa yang kompetitif, antara lain diperlukan perundangan yang stabil, sistem pendidikan yang mantap, hubungan sosial yang dijaga dengan menciptakan kelas menengah yang kuat untuk mengurangi kesenjangan sosial, birokrasi dan reformasi yang memfokuskan diri pada kualitas dan kecepatan pelayanan.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pelayanan umum juga mempunyai kedudukan yang tidak bisa dianggap remeh. Disamping itu, menurut Moenir hal ini karena masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang wajar (2002:40).

Pengertian pelayanan umum menurut Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 adalah sebagai berikut:

Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemecahan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut Moenir (2002:40-41) berpendapat bahwa perwujudan pelayanan yang didambakan oleh masyarakat antara lain:

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran/untaian dan kata-kata lainnya.
3. Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan yang sama terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam segala bidang maka kendala-kendala yang selama ini ada merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk segera menindaklanjutinya. Hal ini berkaitan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dilihat sebagai suatu syarat bagi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan.

Salah satu pelayanan umum yang masih dirasakan kurang mencerminkan pelayanan yang didambakan masyarakat adalah pelayanan pembuatan Akta

Kelahiran. Banyak alasan mengapa masyarakat masih belum melengkapi anaknya dengan Akta Kelahiran. Selain para orang tua tidak memahami arti penting Akta Kelahiran, pembuatan Akta dinilai terlalu sulit dan rumit. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya Akta Kelahiran (Republika, 15 September 2004).

“Akta Kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara” (Hilda, dalam Bandung Raya, 17 Januari 2003). Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara dari 19 negara yang dinilai buruk dalam hal kepemilikan Akta Kelahiran anak-anak. Hingga saat ini sekitar 80% anak di Indonesia termasuk di Jabar, masih belum memiliki akta kelahiran (Bandung Raya, 17 Jan 2003).

Sedikitnya minat para orang tua untuk membuat Akta Kelahiran untuk anak-anaknya juga terjadi di Kabupaten Jember.